

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN
PERKOSAAN

(Studi Kasus Polres Metro Lampung)

Oleh

GEVITA AYUDIA HADIK

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk instrumen hukum baik preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum termasuk Perempuan korban kejahatan pemerkosaan. Perempuan korban perkosaan tentu saja harus mendapat perhatian yang serius, untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang memadai. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah kajian viktimologi terhadap perlindungan hukum bagi korban kejahatan perkosaan. Apa sajakah faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerkosaan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data primer serta data sekunder melalui studi pustaka dan wawancara dengan Satuan Unit PPA Satreskrim Polres Metro Lampung, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung, Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kajian viktimologi dalam perlindungan hukum bagi korban perkosaan belum sepenuhnya berpihak pada korban dan masih memerlukan perhatian serius. Perlindungan hukum baru diberikan setelah korban mengajukan permohonan ke LPSK lembaga berwenang lainnya, sementara KUHP hanya mengatur secara terbatas melalui gugatan ganti rugi. Dengan hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UU No. 13 Tahun 2006, perlindungan menjadi lebih menyeluruh karena mencakup aspek fisik, psikis, dan materiil. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh berbagai faktor,

Gevita Ayudia Hadik

seperti kurangnya aturan yang memadai, aparat penegak hukum yang belum profesional, keterbatasan fasilitas dan dana, serta budaya patriarki dan stigma masyarakat yang menyalahkan korban.

Saran dalam penelitian ini diharapkan agar pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan, termasuk pengesahan undang-undang khusus yang menjamin hak korban terutama terkait ganti rugi, serta peningkatan profesionalisme dan integritas aparat hukum demi terwujudnya perlindungan hukum yang optimal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, dan Perkosaan.

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF RAPE CRIMES
(Case Study of Polres Metro Lampung)

By

GEVITA AYUDIA HADIK

Legal protection is the protection granted to legal subjects in the form of legal instruments, both preventive and repressive, whether written or unwritten. Every person has the right to receive legal protection, including women who are victims of rape crimes. Female victims of rape certainly deserve serious attention, which requires adequate legal protection. Although laws regulating this issue already exist, their implementation still faces several obstacles. The problems addressed in this thesis are: How is the victimology perspective applied to legal protection for victims of rape crimes? What are the inhibiting factors in providing legal protection to victims of rape?

This research uses both normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection methods include primary and secondary data through literature studies and interviews with the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) Polres Metro Lampung, the Women's Advocacy Institution DAMAR Lampung, and Criminal Law lecturers at the University of Lampung. The data were then processed and analyzed qualitatively to obtain conclusions.

Based on the research results and discussion, legal protection for rape victims from a victimology perspective has not fully sided with the victims and still requires serious attention. Legal protection is only provided after victims apply to the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), while the Criminal Procedure Code (KUHAP) only regulates compensation claims in a limited manner. With the enactment of Law No. 31 of 2014 as an amendment to Law No. 13 of 2006, protection has become more comprehensive, covering physical, psychological, and material aspects. However, implementation is still hindered by various factors such as inadequate regulations, lack of professionalism among law enforcement officers, limited facilities and funding, as well as patriarchal culture and societal stigma that blame the victims.

Gevita Ayudia Hadik

This study recommends that the government, law enforcement agencies, and related institutions improve protection for female rape victims, including the enactment of specific laws guaranteeing victims' rights, especially concerning compensation, as well as enhancing the professionalism and integrity of law enforcement officers to achieve optimal legal protection.

Keywords: Legal Protection, Victims, and Rape